

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Sejarah kerja paksa warga Korea yang terjadi di Pulau Hashima pada saat sebelum dan sesudah Perang Dunia II mengakibatkan hubungan antara Jepang dan Korea semakin memburuk. Kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang terhadap warga Korea yang terjadi di pertambangan Hashima sangat kejam. Para pekerja paksa bekerja untuk dua belas jam setiap harinya bukan di darat, melainkan di dalam bawah tanah sedalam satu kilometer dengan suhu terowongan bawah tanah setinggi 113 derajat Fahrenheit sehingga para pekerja paksa tersebut hanya dapat menggunakan pakaian dalam selama bekerja. Jumlah korban di pertambangan sangat tinggi dari 600 orang pekerja, 122 orang diantaranya meninggal. Yang lebih tragis adalah jumlah dari para korban bunuh diri mencapai 10 orang, dan yang mati tenggelam sekitar 24 orang.

Pekerjaan yang dihadapi warga Korea di Pulau Hashima sangat keras dan tidak layak, para pekerja paksa hanya diberikan makanan dari 80% ampas kacang dan 20% beras merah direbus bersama dengan sarden utuh menjadi bubur tanpa bentuk. Hampir setiap hari para pekerja di Hashima menderita diare, kekuatan tenaganya berangsur-angsur hilang. Jika mencoba untuk beristirahat, para penjaga akan datang dan memaksa harus tetap bekerja. Selain itu, saat hari upah pekerja tiba perusahaan tidak pernah memberikan upah uang tunai kepada para pekerja paksa di pertambangan Hashima. Sebagian besar uang dari upah pekerja dikurangkan dan dimasukkan menjadi daftar hitam dalam laporan gaji.

Terdapat sebuah survey yang mengatakan bahwa dari 92 kematian orang Korea berumur diatas 17 tahun. Dua puluh delapan orang (30%) disebabkan oleh penyakit seperti pneumonia dan asma, tiga belas orang (14%) disebabkan cedera seperti memar dan patah tulang, dan tujuh belas orang (18,5%) disebabkan mati lemas atau dipaksa mati setelah terkubur karena kecelakaan kerja di pertambangan bawah laut.

Pada tahun 1945 bom atom mengguncang jendela di blok apartemen Hashima dan Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu pada Agustus 1945, sekitar 1.300 para pekerja paksa tewas di pulau itu, beberapa orang mengalami kecelakaan bawah tanah, dan yang lainnya karena mengalami penyakit yang berkaitan dengan kekurangan gizi dan kelelahan. Sedangkan yang lain memilih kematian yang lebih cepat atau bunuh diri, karena merasa tidak sanggup menjadi pekerja paksa di Hashima dengan perlakuan yang tidak layak sebagai pekerja. Para pekerja paksa tidak mendapatkan upah yang sesuai dan hanya mendapatkan makanan seadanya bahkan makanan yang diberikan seringkali tidak layak dimakan untuk manusia. Beberapa sebagian dari mereka berusaha melopati tembok laut dan mencoba melarikan diri dengan cara berenang berakhir sia-sia ke daratan.

Pemerintah Jepang terus melakukan beberapa upaya untuk mengelola Pulau Hashima setelah resmi semua kegiatan pertambangan ditutup. Seperti mengelola kembali Pulau Hashima menjadi tempat wisata yang bersejarah. Dibalik semua sejarah yang berada di Hashima terdapat kasus yang tidak akan pernah terlupakan oleh bangsa Jepang maupun bangsa Korea. Kasus kerja paksa warga Korea yang terjadi di pertambangan Hashima menyebabkan Pemerintah Korea meminta pertanggung jawaban atas kasus tersebut. Korea tidak terima bahwa ratusan orang warganya dijadikan budak pekerja paksa di pertambangan Hashima.

Pada saat pemerintah Jepang berupaya ingin memasukkan pulau Hashima menjadi salah satu Situs Warisan Dunia oleh UNESCO mendapatkan banyak kontroversi dari berbagai pihak, meskipun Hashima merupakan situs revolusi industri pada zaman Meiji di Jepang. Meskipun awalnya mendapat tentangan dari pemerintah Korea dikarenakan mengabaikan penderitaan sejumlah besar warganya yang dikirim untuk bekerja menjadi pekerja paksa di Pulau Hashima oleh penjajah Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II. Setelah melakukan beberapa negosiasi, pihak Korea memutuskan untuk mencabut tentangannya dengan beberapa perjanjian yang ditawarkan oleh Jepang. Pemerintah Jepang berupaya untuk

memasukkan langkah-langkah yang tepat ke dalam strategi interpretatif untuk mengingat para korban warga Korea yang menjadi pekerja paksa sebagai pendirian pusat informasi.

Jepang juga akan mendirikan pusat informasi untuk menghormati para korban, menurut sebuah pernyataan di situs web kementerian luar negeri Korea Selatan. di bawah ancaman oposisi formal, pihak Jepang mengumumkan bahwa mereka, “siap untuk mengambil langkah-langkah yang memungkinkan pemahaman bahwa ada sejumlah besar orang Korea dan lainnya yang dihadapkan pada kehendak mereka dan dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang keras di tahun 1940-an di beberapa situs termasuk yang terjadi di Pulau Hashima. Hal ini merupakan upaya pemerintah Jepang untuk mempertanggung jawabkan kerja paksa yang terjadi di Pulau Hashima dan berencana untuk membangun pusat informasi tentang para korban.

Namun hingga saat ini perselisihan antara Jepang dan Korea Selatan belum mendapatkan mufakat karena menurut pihak Korea Selatan, Jepang belum memenuhi semua janjinya yang sudah di sepakati saat Pulau Hashima diresmikan menjadi salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO.